

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nurhasanah, Muhammad Alwi, Titi Yuniarti

Universitas Mataram

Nurhasanah61102@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satu sektor unggulan kontribusya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah sehingga sektor dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah. Penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di perkirakan disebabkan oleh banyak faktor seperti pendapatan, pendidikan, kualitas pelayanan dan lainnya. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dijadikan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara pendapatan, pendidikan, kualitas pelayanan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan pringgabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan kuesioner. Responden yang diteliti terdiri dari 100 responden melalui metode non probability sampling berupa accidental sampling. berdasarkan hasil uji parsial tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 (Pendapatan) berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak Hal ini dapat diketahui dengan melihat t-hitung sebesar 0,487 dan t-tabel sebesar 1,968 yang artinya nilai t-tabel lebih besar dengan t-hitung, sedangkan variabel pendidikan X2 (pendidikan) berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan pringgabaya dengan melihat t-hitung sebesar 0,428 dan t-tabel sebesar 1,968 yang artinya nilai t-tabel lebih besar dengan t-hitung, dan variabel X3 (Kualitas pelayanan) berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan pringgabaya dengan melihat t-hitung sebesar 0,792 dan t-tabel sebesar 1,968 yang artinya nilai t-tabel lebih besar dengan t-hitung.

Kata Kunci : Tunggakan pajak, Kendaraan bermotor, Analisis regresi berganda.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaraberdasarkan pancasila dan UUD 1945, sehingga menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dan gotong -royong nasional, yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk memperlancar Pembangunan nasional. Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional (M.Rosidi 2013).

Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari pemungutan pajak Daerah. Peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, Hal ini agar sejalan dengan upaya pemerintahan untuk membangun kemandirian dalam pembangunan. akan tetapi upaya tersebut masih menemui hambatan karna masih kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam seluk beluk perpajakan (Eymilia Oktavia,dkk 2019). Peran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat di harapkan . Namun, jika dalam kenyataan dijumpai adanya tunggakan pajak, terlebih lagi bila dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, maka diperlukan penanganan yang serius. Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan Negara setiap Wajib pajak harus mau dalam membayar pajak tersebut. maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sendiri. Tanpa adanya pengertian dan kesadaran dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satu contohnya wajib pajak dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Tabel :1 Jumlah Tunggakan PKB Tahun 2019 S/D Tahun 2022

Tahun	Kecamatan	Obyek (orang)	PKB (RP)
2019	Kec.pringgabaya	3.693	3.917.971.467
2020	Kec.pringgabaya	4.143	3.645.385.587
2021	Kec.pringgabaya	3.574	2.307.180.791
2022	Kec.pringgabaya	3.669	1.192.002.87
2019- 2022	jumlah	15.079	11.062.540.303

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tunggakan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangatlah banyak. Berdasarkan Data pada kantor BAPPENDA NTB, pembelian kendaraan baru rata-rata mencapai 300 obyek. Data tunggakan pajak Kendaraan bermotor di Kec.pringgabaya pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mencapai 11 miliar. Hal ini yang membuat BAPPENDA NTB Harus melakukan upaya-upaya agar tunggakan pajak dapat segera tercairkan. (Muhammad Safri,dkk 2019). Tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah suatu fenomena yang sering terjadi di setiap daerah. Tunggakan pajak kendaraan bermotor terutama di desa Pringgabaya sangat tinggi karna perilaku masyarakat yang lalai akan kesadaran membayar pajaknya, dan juga masyarakat menganggap kendaraan yang mereka miliki itu tidak menggunakan jalan sampai ke kota inilah yang menyebabkan masyarakat yang lalai akan tidak membayar pajak tersebut. Adanya fenomena penunggakan pajak kendaraan ini membuat kemampuan daerah dalam penyerapan pajak kendaraan bermotor belum semaksimal mungkin. Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian di antaranya : Kesadaran, Pendapatan, Kelalaian, Gaya-gayaan, dan memakai kendaraan untuk jarak dekat.

Tabel 2 jumlah tunggakan PKB kec.pringgabaya Tahun 2023 S/D Tahun 2024.

NO	TAHUN	KUNING		MERAH		PUTIH/ HITAM		TOTAL	
		OBYEK	PKB	OBYEK	PKB	OBYEK	PKB	OBYEK	PKB
1	2023	18	19.133.046	20	2.785.600	3.528	1.123.159.251	3.566	1.145.077.897
2	2024	19	19.932.384	8	2.373.500	2.505	908.277.985	2.532	930.583.869
TOTAL		37	39.065.430	28	5.159.100	6.033	2.031.437.236	6.098	2.075.661.766

Sumber : Samsat Selong / UPTB UPPD Selong

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor pendapatan, pendidikan, dan Kualitas pelayanan pada wajib pajak secara parsial dan simultan terhadap tunggakan pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kalangan umum, hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Dimana pajak bersifat paksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang mengerikan dibenak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata "Pajak". Sehingga bisa dikatakan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak akan terbayang-bayang oleh tanggungan karena kita harus membagi hasil yang kita dapat untuk membayar pajak, apalagi manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan. Menurut ahli Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berbeda dengan pengertian pajak menurut Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. kemudian dijelaskan pula dalam pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah "kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran Rakyat.

Pajak Kendaraan bermotor

Pajak ialah sumbangan masyarakat ke kas Negara tercantum dalam peraturan yang condong memaksa tidak memberikan manfaat secara langsung ke rakyat tetapi iuran tersebut ddi peruntukkan membayar pengeluaran umum. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) memiliki arti kepunyaan dan penguasaan kendaraan bermotor .Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan beroda diiringi gandengannya yang di operasikan di jalan. PKB yakni pajak daerah yang diambil dari rakyat yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor untuk pembangunan dan pengembangansuatu daerah tersebut Dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 dijelaskan, PKB bahwa “pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor”. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenagagerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pungutan wajib untuk rakyat yang diambil secara paksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku memiliki kekuasaan kendaraan beroda dan gandengannya yang di operasikan di jalan.

Hambatan Dalam Pembayaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 8) hambatan dalam pembayaran pajak :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2.Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung di tujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

Pengertian Tunggakan pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006 : 1) “Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007:40) “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan dan putusan Banding”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019), adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis.

Objek penelitian

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak di kecamatan Pringgabaya.

Populasi

Menurut sugiyono (2017 : 117) populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya . populasi dalam penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT selong tahun 2023-2024 yaitu 6.098 wajib pajak perseorangan yang aktif yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ialah non probability sampling berupa accidental sampling . dimana accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel (sugiyono,2019 : 124). Jumlah sampel yang di ambil menggunakan rumus slovin (Husein Umar 2004) sebagai berikut : $n =$

$$\frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Nilai kritis (Batas ketelitian) yang di inginkan (10%)

Berdasarkan rumus slovin, maka pengambilan sampel dari jumlah kuesioner yang

diedarkan adalah sebagai berikut :

$$\frac{6.098}{1+6.098(0,1)^2}$$

$$= \frac{6.098}{1+6.098(0,01)}$$

$$= \frac{6.098}{1+60,98}$$

$$= \frac{6.098}{61.98}$$

= 98,38(dibulatkan menjadi 100 responden)

Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear berganda adalah salah satu bentuk analisis regresi linier di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis regresi adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap Variabel tidak bebasnya. Dimana

perhitungan data dengan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keteerangan :

Y_i = Tunggalan PKB

α = intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, = Koefisien regresi

X_1 = Tingkat pendidikan(tahun)

X_2 = Pendapatan (rupiah)

X_3 = Kualitas pelayanan

ϵ = Eror

Pengujian selanjutnya yaitu uji deteksi asumsi klasik terdapat uji multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, uji Normalitas.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F. Sedangkan untuk memastikan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen dilakukan uji t dan uji dominan dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh dominan di dalam regresi linier berganda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a					
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
pendapatan	0.150	100	0.289	0.842	100	0.265
pendidikan	0.164	100	0.475	0.908	100	0.334
kualitaspelayanan	0.282	100	0.304	0.797	100	0.528
tunggakanpkb	0.247	100	0.133	0.837	100	0.418

Sumber : SPSS,data olahan 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan untuk variable dependent tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 0,133, untuk variable pendapatan sebesar 0,289, untuk variable lpendidika nmemiliki nilai sebesar 0,475, sedangkan untuk variable kualitas pelayanan sebesar 0,304. Maka dapat di simpulkan bahwa semua variable secara statistic telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

b. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
Pendapatant	48.440	12.345		3.924	0.045
Pendidikan	0.052	0.420	0.013	0.125	0.901
kualitaspelayanan	-0.330	0.300	-0.112	-1.102	0.273
Tunggakanpkb	-0.022	0.044	-0.049	-0.487	0.628

Sumber: SPSS ,Olahan Data 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variable pendapatan memiliki nilai signifikan 0.045, variable pendidikan memiliki nilai signifikan 0.901, dan variable kualitas pelayanan memiliki nilai signifikan 0.273. nilai –nilai tiap variabel yang bernilai lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disebut dengan homoskedastisitas

c. Uji Multikolinieritas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.096	0.009	-0.022	12.11794

a. Predictors: tunggakanpkb,, pendapatan, pendidikan, kualitaspelayanan

b. Dependent Variable:

Sumber : SPSS, Olahan Data 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa diketahui bahwa nilai R square yang diperoleh lebih kecil daripada nilai R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi dan layak di gunakan di penelitian ini:

Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF	
1	tunggakanbpkb		61.886	29.812		2.076	0.041	
	pendidikan		-0.764	0.959	-0.081	-0.796	0.428	1.015
	Kualitaspelayanan		-0.182	0.691	-0.027	-0.264	0.792	1.027
	pendapatan		-0.114	0.234	-0.050	-0.487	0.628	1.013

Sumber : SPSS , Olahan Data 2024

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut :

$$Y = 61.886 - 0,114X1 - 0,764X2 - 0,182 + e$$

Y =Tunggakan pajak kendaraan bermotor dikecamatan pringgabaya

X1 = Pendapatan

X2 = Pendidikan

X3 = Kualitas pelayanan

Persamaan di atas dapat di artikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar Rp. 61.886 menyatakan bahwa jika variable Pendapatan (X1), Pendidikan (X2), dan Kualitas pelayanan (X3) tidak ada maka variable dependen Tunggakan pajak (Y) sebesar nilai konstanta yaitu Rp, 61.886.
2. Nilai koefisien pendapatan sebesar 0,114 menyatakan bahwa jika variable pendapatan (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 poin sedangkan variable lainnya dianggap tetap, maka variable dependen akan mengalami penurunan sebesar 0,114 Rupiah. Artinya apabila pendapatannya tinggi maka tunggakan pajaknya menurun .
3. Nilai koefisien pendidikan sebesar 0,764 yang menyatakan bahwa jika variable pendidikan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 poin sedangkan variable lainnya di anggap tetap, maka variable tunggakan pajak PKB (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,764 Rupiah .Artinya apabila Pendidikannya tinggi maka tunggakan pajaknya menurun.

4. Nilai koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,182 yang menyatakan bahwa jika variable kualitas pelayanan (X3) Mengalami kenaikan sebesar 1 poin sedangkan variable lainnya di anggap tetap ,maka variable tunggakan pajak PKB (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,182 Rupiah.Artinya apabila kualitas pelayanan baik maka tunggakan pajaknya menurun.

Pengujian hipotesis

Hasil Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. Dan jika signifikan masing-masing variable $< 0,05$ maka variable tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

$$\begin{aligned} T \text{ table} &= n-k-1 \\ &= 100-5-1 \\ &= 96 \\ &= 1,968 \end{aligned}$$

1. Pengaruh variable pendapatan (X1) terhadap tunggakan pajak

Variabel pendapatan memiliki t hitung sebesar 0,487 sedangkan t table sebesar 1,968 .maka di ketahui t- hitung (0, 487) $<$ t tabel (1,984) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,628. Sehingga hipotesis antara pendapatan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (HO diterima dan Ha di tolak) . Artinya secara parsial variable pendapatan tidak signifikan mempengaruhi terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan pringgabaya. Tanda yang di hasil kan adalah negative yang artinya bukan karna seseorang tidak mempunyai pendapatan untuk tidak membayar pajak tersebut tetapi disebabkan juga oleh faktor lain seperti factor kesadaran, kelalaian, atau mur yang menyebabkan seseorang yang menunggak pajak kendaraan bermotor tersebut.

2. Pengaruh variable pendidikan (X2) terhadap tunggakan pajak

Variabel pendidikan memiliki t hitung sebesar 0,428 sedangkan t –tabel sebesar 1,968 . maka di ketahui t hitung(0, 428) $<$ t tabel (1,984) . dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,428 .sehingga hipotesis antara pendidikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor(HOditerima Ha di tolak) Artinya secara parsial variable pendidikan tidak signifikan mempengaruhi terhadap

tunggakanpajakkendaraanbermotor di kecamatan pringgabaya. Tanda yang di hasilkan negative yang artinya bukan karna seseorang yang mempunyaipendidikan yang rendah untuk tidak membayar pajak tetapi ada faktor lain seperti factor kesadaran. Kelalaian, atau umur yang menyebabkan seseorang menunggak pajak tersebut .

3. Pengaruh variable kualitas pelayanan (X3) terhadap tunggakan pajak

Variable kualitas pelayanan memiliki t hitung sebesar 0,792 sedangkan t table sebesar 1,968. Maka diketahui t hitung sebesar $(0,792) < t \text{ table } (1,968)$, dan memilki nilai signifikan 0,792. Sehingga hipotesis antara kualitas pelayanan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (HO di terima Ha di tolak) artinyaa secara parsial kualitas pelayanan tidak signifikan mempengaruhi terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan pringgabaya.

Hasil uji signifikan simultan (Uji f)

Nilai F hitung sebesar 4,078 sedangkan nilai F table sebesar 2,31 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulannya bahwa pendapatan, pendidikan dan kualitas pelayanan secara bersamaaan berpengaruh terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan pringgabaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa secara parsial variable pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kecamatan pringgabaya . hal ini dapat di buktikan nilai t hitung yang lebih kecil daripada nilai t tabel $(0,487) < t \text{ tabel } (1,984)$ Sehingga HO di terima dan Ha di tolak.
2. Berdasarkan hasil uji t di ketahui bahwa secara parsial variable pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kecamatan pringgabaya . Hal ini dapat di buktikan nilai t hitung yang lebih kecil daripada nilai t tabel $(0,428) < t \text{ tabel } (1,984)$. sehingga HO di terima dan Ha di tolak.
3. Berdasarkan hasil uji t di ketahui bahwa secara parsial variable kualitas pelayanan tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kecamatan pringgabaya . Hal ini dapat di buktikan nilai t hitung yang lebih besar daripada nilai t tabel(0,792) < t tabel (1,984) sehingga H_0 di terima dan H_a di tolak.

4. berdasarkan hasil statistic uji F, di ketahui bahwa variable pendapatan, pendidikan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Hal ini dapat di buktikan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel (4,078 > 2,31).

Saran

1. Di harapkan kepada semua masyarakat yang wajib pajak mempunyai rasa kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun pendapatannya tidak mengalami peningkatan tetapi harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam membayar pajak PKB tersebut.
2. Kepada kantor SAMSAT di kecamatan pringgabaya diharap kan untuk dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan masyarakat membayar kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, S., & Subadriyah. (2018). Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2, 18.
- Algun Neo Situmeang. (2023) . *Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*.
- Ani Sri Rahayu, (2012). *Pengantar Kebijakan Fiskal*.
- Butarbutar, T. E. (2014, Desember). Analisis Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi,Manajemen,Bisnis Dan Akuntansi*, 2,1
- Dapot Lumban Gaol, dkk. (2023). *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Medan Selatan*.
- Desti Handayani. (2020) *Pengaruh Kesadaran, Kualitas pelayanan, pendapatan dan Religius Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta*.
- Felicia, A. L. (2022). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marzuki. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Tunggakan Pajak Pajak Pada KPP Pratama Banteng*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Merri Ugrahei.(2010) . *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Aset Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*.
- Oktavia, E., Safri, M., & Amzar, Y. V. (2019). Faktor faktor Yang mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir). *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10.
- Rosidi , M. (2013). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Pekan Baru Selatan*. Pekan Baru .
- Siska Alfiani. (2018) . *Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta CV.
- Sutrisno.(2022) *Uji Validitas dan uji Realibilitas* .

- Tangoy, J., Engka , D. S., & Masloman, I. (2023, January). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23, 12.
- Ugraheni, M. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kota Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekan Baru*. Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Utomo, B. A. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Tangerang Selatan: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wardati, A. R., Iskandar, & Pattisahasiswa, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 18.